

REGRESI MODERASI DAN NARASI KEGAMAAN DI SOSIAL MEDIA; FAKTA DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN

Ahmad Alfajri¹, Abdul Haris Pito²

¹Program Studi Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
²Pengarusutamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Dan Keagamaan
alfajri@uinjkt.ac.id abdulharispito@gmail.com



<https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.237>

Diterima: 11 Oktober 2021 | Disetujui: 22 November 2021 | Dipublikasikan: 31 Desember 2021

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang menurunnya moderasi beragama di Indonesia dan strategi yang bisa digunakan untuk menetralkan dan mengembalikan semangat moderasi beragama tersebut. Penurunan level moderasi beragama bisa dilihat dari naiknya kecenderungan intoleransi baik antar maupun intra umat beragama di Indonesia dan berkembangnya narasi-narasi keagamaan yang tidak moderat di berbagai *platform* media sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari sejumlah temuan lembaga penelitian tentang toleransi dan moderasi beragama. Dari tinjauan kepustakaan yang dilakukan berhasil ditemukan bahwa regresi moderasi beragama di Indonesia adalah sebuah fakta dan keberadaan media sosial telah mempermudah penyebaran narasi keagamaan yang tidak moderat, media sosial juga menjadi rujukan keagamaan menggantikan otoritas keagamaan lama. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peran lembaga pendidikan dan *civil society* sangat sentral dalam mengembalikan semangat moderasi beragama, begitu juga dengan kemampuan para *stakeholders* untuk bekerjasama secara lintas sektoral.

Kata Kunci: regresi, moderasi, toleransi, Islam Indonesia.

Abstract

This paper discusses the decline of religious moderation in Indonesia and strategies to neutralize and restore religious moderation. The decline is seen through the decreasing level of tolerance both within and between religions and the growing numbers of religious intolerance narratives on various social media platforms. This is qualitative research by using secondary data produced by credible research institutions. This research found that the regression of religious moderation in Indonesia is a fact and social media has contributed significantly to the spread of intolerance narrative; in addition, social media has become a new religious reference, replacing the conventional authority. This study also concludes the central role of educational institutions and civil society in restoring the spirit of religious moderation in Indonesia, also it finds the important role of stakeholders to work collaboratively across sectors.

Keywords: regression, moderation, tolerance, Indonesian Islam



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License



PENDAHULUAN

Dalam sebuah perjalanan menuju tempat pertemuan, kami menggunakan moda transportasi roda empat *online* bersama satu orang rekan lainnya, dalam perjalanan tersebut, kami berdiskusi tentang dinamika dan kondisi kehidupan beragama di Indonesia. Sepertinya sang pengemudi juga mendengarkan diskusi yang kami lakukan dan tiba-tiba bertanya, "Pak, moderasi beragama itu apa sih? Saya sering dengar istilah itu." Kami agak kaget sekaligus antusias, kami kemudian berusaha menjawab pertanyaan sang pengemudi tersebut. Pada lain kesempatan, kami juga pernah diundang berdiskusi tentang topik yang sama dengan rekan sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lagi-lagi pertanyaan tersebut muncul, "apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, bukankah moderasi itu sama dengan liberal?"

Berkaca dari dua pengalaman tersebut, kami menyimpulkan bahwa term moderasi beragama sebenarnya sudah cukup dikenal oleh masyarakat, namun term tersebut belum dipahami secara baik. Jika dilihat silsilahnya, istilah moderasi memang bukan istilah yang baru muncul belakangan ini, namun pemberian makna dan *discourse* terhadap term tersebut baru menemukan momentumnya dalam beberapa tahun terakhir.

Dinamika kehidupan keagamaan yang cukup dinamis -kadang cenderung negatif-belakangan ini mendesak term moderasi beragama muncul ke permukaan dan memperkuat diri. *Discourse* tentang moderasi masuk ke dalam perdebatan akademik sehingga popularitas term moderasi beragama semakin meningkat.

Moderasi beragama sendiri bagi Indonesia adalah identitas sekaligus menjadi *bargaining position* di level internasional. Indonesia sering menggunakan term moderasi untuk menunjukkan posisi Indonesia dalam berbagai isu penting di level global. Tidak mengherankan jika moderasi beragama ini

kemudian menjadi agenda penting yang akan dan terus dijalankan oleh bangsa Indonesia ke depan.

Moderasi beragama sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Kemenag, 2020). Ini berarti, semua komponen dan institusi di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadikan moderasi -dengan segala aspeknya- sebagai rencana pembangunan lima tahun ke depan. Kementerian Agama tentu saja akan menjadi *leading sector* dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Kementerian Agama menjadi tulang punggung penguatan moderasi bergama. Bagi Kementerian Agama, moderasi bergama adalah jantung perjuangan dan target immaterial yang harus dicapai.

Masuknya moderasi beragama pada RPJMN 2020-2024 tentunya didasarkan pada pertimbangan yang sangat urgen. Dalam pengamatan awam, masuknya moderasi bergama dalam RPJMN adalah sebagai respon terhadap munculnya "tekanan-tekanan" terhadap falsafah dan stabilitas kerukunan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Tekanan tersebut hanya bisa diatasi dengan cara penguatan beragama yang tidak ekstrem kanan dan kiri dalam masyarakat.

Tulisan ini akan membahas tentang fakta menurunnya semangat moderasi beragama di Indonesia dengan merujuk pada sejumlah temuan penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian kredibel. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar untuk membangun strategi-strategi yang bisa diambil untuk mengembalikan semangat moderasi beragama. Jika ini tidak dilakukan tentu moderasi beragama -yang selama ini menjadi ikon Islam Indonesia di mata internasional- berpotensi untuk hilang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian

kualitatif adalah pendekatan pencarian kesimpulan dalam suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, dan perilaku (Bogdan, 1992). Lawrence Neuman lebih lanjut mengatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada konteks sosial untuk memahami dunia sosial, penelitian ini mengacu pada kejadian atau peristiwa yang ada dan sangat bergantung pada konteks kemunculannya, saat peneliti menghilangkan satu peristiwa maka makna yang sebenarnya akan hilang (Neuman, 2004). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang bertujuan untuk mendapat kesimpulan atas cara berpikir induktif atau dibangun berdasarkan pada tindakan eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dan melihat karakteristik antar fenomena yang terjadi (Sukmadinata, 2011). Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut penelitian kualitatif deskriptif ini menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi melalui penjelasan dan gambaran yang didapat melalui data dan sampel.

Dalam hal pengumpulan data, penelitian banyak bergantung pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan menggunakan data dan temuan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh lembaga-lembaga penelitian seperti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Lembaga Survei Indonesia (LSI), The Wahid Institute, Setara Institute dan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama. Data-data tersebut akan saring, dikategorisasikan dan diolah, serta dialanilis sesuai dengan argumen yang ingin dibangun dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Regresi Moderasi

Istilah moderat sangat erat kaitannya dengan kata toleran. Bahkan keduanya memiliki keterkaitan makna yang sangat kuat. Orang yang moderat cenderung toleran terhadap perbedaan, begitu juga sebaliknya. Sehingga, untuk mengukur level/kualitas moderasi bangsa Indonesia, salah satunya, bisa dilakukan dengan mengukur level toleransi bangsa Indonesia terhadap pandangan/orang yang berbeda.

Tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya *discourse* tentang pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia dilatarbelakangi oleh fakta meningkatnya intoleransi pada masyarakat Indonesia. Inilah yang saya sebut dengan regresi moderasi. Munculnya penurunan sikap moderasi dan toleransi pada masyarakat kita. Banyak lembaga riset yang telah menunjukkan bahwa intoleransi dan "ketidakmoderatan" dalam beragama meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadi ancaman bagi keutuhan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang kemudian disebut dengan regresi moderasi.

Penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2006 tentang toleransi sosial masyarakat Indonesia menemukan bahwa meskipun secara umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cukup toleran, namun toleransi terhadap orang yang berbeda agama lebih rendah. Sejumlah 36,7 persen responden mengatakan keberatan jika penganut agama lain mengadakan acara keagamaan/kebaktian di sekitar mereka tinggal. Sebanyak 42,3 persen keberatan jika penganut agama lain mendirikan tempat ibadah di sekitar tempat tinggal mereka. Bahkan 64 persen tidak setuju jika kelompok yang mereka tidak sukai boleh melakukan demonstrasi untuk menyuarkan aspirasi mereka (LSI, 2016).

Penelitian LSI tahun 2018, kembali mengkonfirmasi temuan yang sama. Terdapat 38 persen warga muslim keberatan jika



penganut agama lain mengadakan kegiatan keagamaan di sekitar mereka tinggal. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari angka tahun 2017 (36 persen), 2016 (40 persen) dan 2006 (38 persen). Dalam survei 2018 ini, ada sebanyak 52 persen muslim Indonesia keberatan jika non muslim mendirikan rumah ibadah di sekitar mereka tinggal. Angka ini lebih tinggi dari data 2017 (48 persen) dan sama dengan angka di tahun 2016. Sejumlah 59 persen muslim keberatan jika non muslim menjadi presiden. Angka ini lebih tinggi dari 2017 (53 persen) dan 2016 (48 persen) (LSI, 2008).

Setara Institute (2008) juga melakukan penelitian tentang intoleransi masyarakat dan restriksi negara dalam kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa terdapat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 265 peristiwa. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Juni (103 peristiwa). Bulan Juni adalah bulan di mana desakan dan persekuasi terhadap Ahmadiyah mengalami eskalasi cukup tinggi, baik sebagai desakan terhadap pemerintah agar mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah maupun sebagai dampak serius dari adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah.

Dilihat dari wilayah terjadinya peristiwa pelanggaran, tiga provinsi menunjukkan angka pelanggaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jawa Barat (73 peristiwa), Sumatera Barat (56 peristiwa) dan Jakarta (45 peristiwa). Tiga provinsi ini memiliki tingkat toleransi yang rendah sekaligus menyimpan potensi konflik agama cukup tinggi (Setara Institute, 2008).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2018) juga melakukan penelitian tentang intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Penelitian ini melibatkan 1800 responden di sembilan provinsi di Indonesia. Hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dari survei-survei serupa sejak 2016. Sebesar 56 persen warga Indonesia mengatakan hanya akan

menerima pemimpin yang seagama. Angka ini tidak jauh berbeda dari hasil penelitian LSI 2018 dengan jumlah 52 persen.

Selain itu, 30 persen masyarakat Indonesia menganggap agamanya paling benar dan pemeluk agama lain berada dalam kesesatan. Hasil yang cukup berbeda adalah soal keberatan atau tidak masyarakat muslim jika non muslim mendirikan rumah ibadah di sekitar mereka tinggal. Dalam penelitian LIPI diperoleh hasil sekitar 40 persen mengatakan keberatan dan menolak pendirian tempat ibadah agama lain di sekitar mereka tinggal, sementara dalam penelitian LSI di tahun yang sama menunjukkan angka 52 persen.

Penelitian PPIM tahun 2017 yang bertema "Api dalam sekam; Keberagaman Muslim Gen Z" memperkuat temuan di atas. Pada penelitian 2017, melalui pengumpulan data dari 1800 responden siswa/mahasiswa di 34 provinsi, ditemukan hasil bahwa tingkat intoleransi dan radikalisme siswa/ mahasiswa muslim cukup tinggi. Sebanyak 34 persen siswa dan mahasiswa memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lainnya. Tingkat intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam Islam (seperti Ahmadiyah, Syiah, dan lain-lain) jauh lebih tinggi mencapai 51% (PPIM, 2017).

The Wahid Institute juga melakukan penelitian bertema toleransi umat bergama. Tahun 2014 The Wahid Institute melakukan penelitian bertema kebebasan beragama/berkeyakinan dan toleransi. Penelitian ini mencakup 18 wilayah pemantauan terdiri dari: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, NTB, NTT, Kepulauan Riau dan Papua.

Hasilnya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2014 berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan 98 aktor negara; sementara 78 peristiwa melibatkan 89 aktor non-negara. Dibanding

tahun 2013, peristiwa pelanggaran tahun 2014 menurun sebanyak 42 persen. Tahun 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 peristiwa. Jumlah ini juga turun 12 % dibanding 2012.

Di tahun 2016, The Wahid institute kembali melakukan penelitian bersama LSI untuk mengukur level intoleransi dan radikalisme masyarakat muslim Indonesia. Penelitian melibatkan 1520 responden muslim di 34 provinsi. Model penelitiannya mengadopsi model *least like group* yang dikembangkan oleh Sullivan. Diketahui hasilnya bahwa 92 persen masyarakat muslim tidak setuju jika kelompok yang dia tidak sukai menjadi aparaturnegara, bahkan 82 persen mengatakan tidak mau hidup bertetangga dengan kelompok yang tidak disukai.

Terkait dengan relasi antara muslim dan non muslim, secara umum survei ini menyimpulkan bahwa 38 persen masyarakat muslim Indonesia tidak toleran terhadap non muslim. Untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu, angkanya lebih tinggi. Saat ditanyakan apakah setuju jika non muslim menjadi presiden, sebesar 48 persen tidak setuju. Saat ditanyakan apakah setuju non muslim mendirikan tempat ibadah di sekitar mereka tinggal, sebesar 52 persen menjawab tidak setuju (The Wahid Institute, 2016).

Kelompok usia muda adalah kelompok yang paling rentan terjerumus ke dalam kecenderungan intoleransi ini. Hal tersebut dikarenakan kelompok usia muda adalah yang paling intens berhadapan dengan media sosial. Penelitian PPIM (2018) mengkonfirmasi hal tersebut, banyak anak muda yang mulai terpapar oleh cara pandangan yang tidak toleran. Sebesar 37.71 persen anak muda (siswa dan mahasiswa) memandang bahwa jihad adalah perang, terutama perang melawan non muslim. Selanjutnya 23.35 persen setuju bahwa bom bunuh diri itu adalah jihad dalam Islam. Hal lain yang tak kalah mengejutkan adalah sebanyak 34.03 persen setuju bahwa jika ada umat muslim yang murtad maka harus dibunuh.

Riset-riset di atas memberikan gambaran bahwa sikap dan pemahaman yang moderat dalam beragama saat ini mendapat tantangan (atau bahkan ancaman) yang cukup serius. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik apabila semua penduduknya hanya dari satu agama saja, sebagian juga menyetujui bahwa pemeluk agama yang berbeda tidak berhak memimpin di daerah yang mayoritas beragama beda. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah, terjadi peningkatan dalam jumlah orang yang memiliki pola pikir seperti itu.

Sosial Media dan Narasi Keagamaan yang Tidak Moderat

Tidak bisa dipungkiri bahwa sosial media sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang di dunia saat ini. Menurut data yang dihimpun oleh WeAreSocial 2020, total populasi dunia mencapai 7,7 milyar, sejumlah 4,5 milyar diantaranya telah menggunakan internet di kehidupan sehari-hari dan 3,8 milyar adalah pengguna sosial media yang aktif. Gambaran data serupa juga terlihat di Indonesia, tahun 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 175 juta, dan 160 juta diantaranya aktif sebagai pengguna sosial media (WeAreSocial.com). Data ini tentu akan terus berkembang seiring dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam mengakses media sosial di *mobile phone* dan harga data internet yang sangat kompetitif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa seakan saat ini kita hidup dalam dua realitas, realitas fisik dan realitas maya. Bahkan, ada sebagian orang yang jauh lebih aktif berinteraksi di dunia maya melalui sosial media dari pada dunia fisik. Itulah mengapa fenomena kehadiran sosial media patut disebut sebagai realitas baru.

Mengingat jangkauan media sosial yang begitu luas, maka penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana. Kalau tidak, akan berakibat cukup fatal. Banyak konflik di dunia yang pada awalnya bersumber dari informasi yang salah (*hoax*) di media sosial baik itu



twitter, youtube, instagram maupun whatsapp. Misalnya, kasus kebohongan yang disampaikan oleh Ratna Sarumpuat tentang pengeroyokan yang dialami, menimbulkan keresahan dan berimbas pada tensi politik yang semakin memuncak, ternyata hanya kedok untuk menutupi gagal operasi plastik. Contoh lain misalnya, informasi yang menyebar di sosial media bahwa vaksin akan melemahkan tubuh anak, ternyata juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.

Keberadaan sosial media yang menjangkau mayoritas penduduk ini tentu menjadikan sosial media sebagai arena kontestasi ide, gagasan, ideologi dan kepentingan banyak aktor. Hampir setiap hari kita menyaksikan pertarungan informasi di berbagai *platform* sosial media antara pendukung gagasan yang berbeda. Di bidang politik, kita pernah menyaksikan -terutama di masa pemilu presiden- pertarungan kelompok-kelompok yang aktif di sosial media (*buzzers*) untuk menggiring opini publik guna mendukung calon yang diusung. Opini tersebut di-*counter* oleh opini yang lain.

Kampanye konvensional tidak lagi dijadikan metode utama, semua sudah beralih ke kampanye menggunakan berbagai *channel* di sosial media. Perang *hashtag* dan meme berhamburan setiap hari. Di bidang ekonomi, kita juga melihat *social media* digunakan sebagai media kompetisi para *entrepreneur* dalam memperebutkan pasar. Pada dasarnya, siapa yang mampu menggiring opini di *social media*, dia kan mendapatkan *benefit* di dunia nyata.

Tak terkecuali agama, saat agama masuk ke ranah *social media*, kontestasi pemikiran keagamaan juga terjadi. Beberapa penelitian menunjukkan indikasi tersebut. Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat menunjukkan bahwa sejak internet dan *social media* menjadi bagian dari keseharian masyarakat (terutama dalam konteks narasi keagamaan), terlihat kontestasi narasi antara tiga jenis media yaitu media Islam *mainstream*

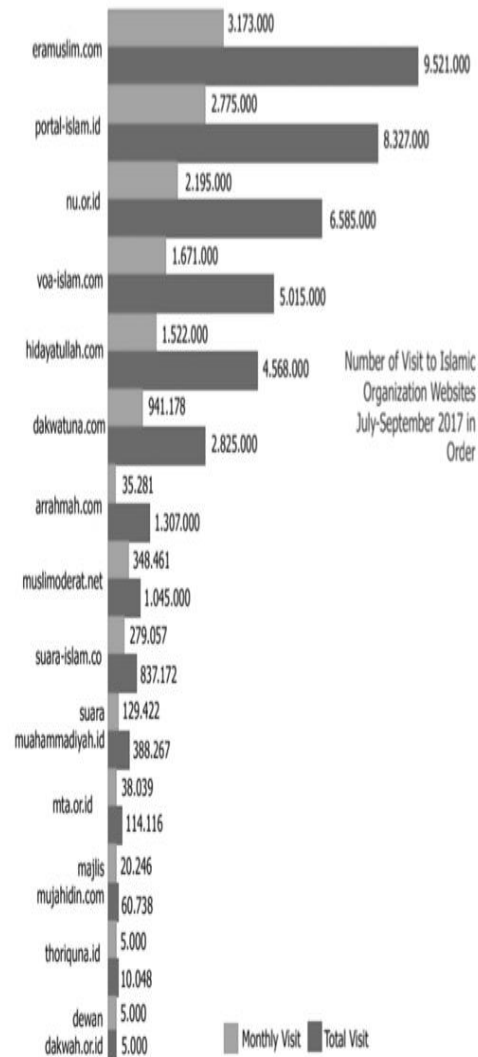
(NU dan Muhammadiyah), media kontemporer (Suara Islam, Hidayatullah MMI, DDII, MTA) dan media non afiliasi (Era muslim, portal Islam, VOA Islam, Arrahmah, Thariquna dan lain-lain) (PPIM, 2018). Masing-masing media memiliki website and akun-akun *social media* masing-masing. Melalui media-media tersebut, narasi-narasi keagamaan disampaikan dan dipopulerkan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Maarif Institute (2018) yang menerbitkan jurnal khusus dengan tema "Islam dan media; kontestasi ideologi di era revolusi digital". Tulisan-tulisan di jurnal tersebut turut mengungkapkan pertarungan ideologi di media sosial. Direktur Eksekutif MAARIF Institute menyebut jurnal tersebut menghimpun artikel-artikel yang dapat mencerahkan informasi tentang pertumbuhan media sosial dan jaringan internet di Indonesia. Selain itu ada juga tulisan Imam Ardianto (2016) juga memotret media sosial sebagai ajang kontestasi pemahaman dan kelompok-kelompok Islam. Ia meneliti perang *hashtag* di twitter antara kelompok #indonesiatanpaFPI dengan #indonesiatanpaJIL tahun 2012. Masing-masing kelompok menggunakan media sosial terutama twitter dalam menyebarkan *hashtag* tersebut.

Jika diamati secara seksama, kontestasi narasi keagamaan di *social media* pada dasarnya adalah perpanjangan tangan dari kontestasi pemikiran di dunia nyata yang sudah ada sebelumnya. Pada dunia nyata kita melihat persinggungan pemikiran yang cukup kuat antara kelompok yang mungkin bisa dikategorikan kelompok eksklusif dengan kelompok inklusif. Kelompok eksklusif cenderung pada gagasan formalisme agama, tekstual, puritan, dan ortodoks, sedangkan kelompok inklusif lebih substantif, kontekstual dan "sinkretis". Dua jenis kelompok ini sudah berdebat sekian lama. Perang *hashtag* #indonesiatanpaJIL dan #IndonesiatanpaFPI bisa ditafsirkan menjadi bagian dari

perdebatan kedua kelompok ini. Masing-masing memiliki corong media sosial.

Akan tetapi, banyak data yang menunjukkan bahwa kontestasi kelompok-kelompok tersebut terlihat tidak kompetitif. Narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok eksklusif seperti jauh lebih bergaung dan diminati oleh publik sosial media. Kembali ke tiga kategori media di atas (*mainstreams*, kontemporer dan non afiliasi), narasi yang dikembangkan di media non afiliasi jauh lebih banyak dibaca oleh para pegiat internet. Ada beberapa contoh narasi yang bisa dimunculkan pada media non afiliasi tersebut seperti (1) yahudi zionis adalah biang kerusakan dunia, (2) perlunya berjihad di Rohingya, (3) mencari jalan mulus ke media jihad, (4) politik intimidasi terhadap muslim (5) Makar orang kafir dan sebagainya (PPIM, 2017). Pengunjung media yang menyajikan narasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan media yang mengusung narasi moderasi. Pembaca media *online* NU hanya berjumlah 6,5 juta orang pada periode Juli-september 2017 dan pada periode yang sama pengunjung media *online* muhammadiyah hanya 300 ribuan pengunjung. Sementara, pengunjung media era muslim mencapai 9,5 juta dan portal Islam, 8,3 juta pengunjung pada periode yang sama. Selengkapnya bisa dilihat dari data yang dikumpulkan PPIM di bawah.



Sumber: PPIM 2018

Hasil di atas diperkuat oleh temuan penelitian International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan jaringan Gusdurian dengan tema “persepsi dan sikap generasi muda terhadap radikalisme dan ekstremisme kekerasan berbasis agama”, yang menunjukkan bahwa lebih banyak pesan yang tidak moderat beredar di berbagai platform sosial media baik di media *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, *instagram*, maupun *youtube*. Penelitian tersebut melakukan *tracing* terhadap kata-kata kunci seperti kafir, sesat, jihad, liberal, musuh islam dan syariat islam. Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan kurang lebih 90 ribu akun sosial media memuat kata-kata kunci tersebut. Pada platform *twitter* terdapat 5.173 kicauan yang memposting kata



kafir dalam satu bulan dan kata komunis sebanyak 995 dalam sebulan.

Di *platform* Facebook, ditemukan 884 unggahan yang memuat kata kunci radikal. Penelitian ini juga mengkomplikasi beberapa contoh narasi keagamaan yang banyak disebar pada akun-akun sosial media tersebut seperti (1) kapitalisme sekuler telah meng-hancurkan agama (2) demokrasi adalah sistem yang buruk (3) umat Islam sudah jauh dari ajaran agama (4) Islam terzalimi dan (5) jalan keluar dari semua ini adalah kembali menagakkan syariat Islam mulai dari individu sampai pada negara.

Dua penelitian di atas menunjukkan bahwa ternyata publik lebih banyak mengunjungi media yang menyajikan naras-narasi tidak moderat. Belum banyak temuan penelitian yang bisa mengidentifikasi "publik" yang di maksud, kelompok usia mereka, gender, pendidikan dan kemampuan ekonomi. Namun, melihat dari kecenderungan yang muncul di berbagai survei, mayoritas publik yang dimaksud di sini adalah kelompok muda, termasuk siswa dan mahasiswa. Seperti yang disampaikan Menteri Agama, Fachrul rozi bahwa -mengutip penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip) bahwa 52 persen siswa setuju dengan narasi keagamaan yang tidak moderat (CNN, 2019). Artinya, siswa dan mahasiswa (notabene adalah kelompok muda) kelompok inilah yang lebih banyak mengakses dan "terkontaminasi" oleh narasi-narasi di atas.

Tulisan ini bukan untuk mengeneralisir bahwa internet dan *social media* tidak bisa digunakan untuk kepentingan keagamaan yang positif. Sepertinya yang disampaikan oleh Eva F Nisa (2018), *social media* seperti whatsapp dan facebook telah menjadi wadah lahir dan berkembangnya gerakan One Day One Juz (ODOJ). Gerakan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi kesalehan di era modern dengan cara kembali membaca Alquran. Gerakan yang dimulai tahun 2004 ini berkembang hingga sekarang.

Penerimaan Narasi Intoleran

Pada bagian sebelumnya sudah digambarkan bahwa media sosial sudah menjadi realitas yang tidak bisa dihindarkan oleh kita semua. Di sisi lain, informasi yang berkembang di sosial media mampu memengaruhi dan membentuk sikap para pembaca sosial media tersebut. Banyak teori yang bisa menjelaskan hal ini. Seperti konstruktivisme, yang berpandangan kebenaran dalam fikiran adalah sesuatu yang dibentuk bukan *given*.

Salah satu cara mengkonstruksi kebenaran adalah dengan mengimajinasikan ide dan menyebarkannya (tentu saja menggunakan media yang banyak diakses), saat ide tersebut sudah diinteraksikan secara reguler dan masif, ide tersebut akan menjadi kebenaran dalam fikiran orang yang membaca. Di saat itulah sikap dan prilakunya akan terbentuk dan dipengaruhi oleh persepsi tersebut. Pandangan ini mirip dengan gagasan *post truth*, bahwa sesuatu yang tidak benar bisa menjadi benar jika diucapkan dan diinteraksikan berkali-kali. Pada bagian atas juga disebutkan bahwa gagasan yang banyak beredar di media sosial adalah gagasan-gagasan yang tidak selalu sejalan dengan pandangan mainstream, bahkan terkesan kontra. Gagasan tersebut terbukti sudah membentuk sikap dan pandangan para pembacanya. Ini adalah sekelumit tentang karakter/demografis para "penyedia" konten dan ilmu di media sosial

Di sisi lain, kita juga perlu mengetahui bagaimana karakter dari para penerima konten/ilmu di media sosial. Banyak tulisan yang menyebutkan bahwa media sosial saat ini cenderung dijadikan sebagai rujukan keagamaan oleh pembaca sosial media. Pada era sebelum sosial media menjadi euforia, otoritas keberagamaan (Islam) dipegang oleh individu atau lembaga yang memang dipercaya publik memiliki pengetahuan agama. Namun pada era media sosial, kecenderungan itu mulai

berubah. Sosial media menjadi rujukan. Kita mengenal ada istilah "kiai google", aktifis sosial media tinggal *search* di google tentang apa yang ingin dia ketahui tentang agama. Kemudian mereka mendapatkan jawaban yang instan dan singkat. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari keberadaan sosial media yang sudah menjadi bagian dari keseharian setiap orang. *Social media* sekarang sudah menjadi jalan keluar untuk semua pencarian informasi tentang agama.

Penelitian PPIM menunjukkan anak-anak muda yang gemar mencari sumber pengetahuan agama melalui internet berupa blog, website dan media sosial mencapai 54,87 persen (PPIM 2018). Dalam beberapa tahun terakhir memang kita saksikan munculnya antusiasme belajar agama yang cukup tinggi di kalangan kelas menengah, diwujudkan dengan belajar secara *online* menggunakan berbagai *platform* sosial media seperti facebook dan youtube. Belajar dengan metode atau media ini sepertinya lebih digemari karena karakter dari social media yang menyuguhkan informasi yang singkat, jelas dan tegas. Tentu ini berbeda dari pembelajaran yang dilakukan melalui metode konvensional, dimana seseorang akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk membaca teks dan konteks sebelum sampai pada kesimpulan akhir.

Metode belajar instan seperti ini tentu mengundang banyak persoalan. Pertama, sangat mungkin narasi atau bacaan yang dirujuk adalah hal-hal yang belum melalui proses riset yang mendalam, belum bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya, atau bisa jadi propaganda semata. Kedua, orang (termasuk media sosial) yang dijadikan rujukan bukanlah yang dipilih karena kredibilitas akademiknya, namun karena mungkin bahasanya yang bagus, atau memiliki pandangan yang cocok dengan pemahaman pembaca. *Social media* adalah *platform* yang bebas dimana semua orang bisa berbicara dan menyebarkan informasi. Untuk hal-hal keagamaan, banyak pertanyaan yang muncul

dan direspon oleh orang-orang yang belum diketahui *record* akademik dan keahliannya. Para pembaca lebih fokus kepada informasi yang disampaikan, bukan pada kualitas penyedia informasi

Melihat kondisi ini, kita menyadari bahwa ada yang janggal dalam proses *supply-demand* pengetahuan dan narasi keagamaan di media sosial. Pemberi ilmu (*supply*) cenderung didominasi oleh narasi-narasi yang kurang moderat sementara pencari ilmu (*demand*) cenderung tidak kritis dalam mencari ilmu, sehingga apa yang dibaca di *social media* dianggap sebagai kebenaran dan diterima secara *taken for granted*. Tentu, mengambil ilmu dan narasi keagamaan di media sosial tidaklah terlarang. Hanya saja, hal tersebut perlu dibarengi kehati-hatian dan penguasaan dasar-dasar ilmu agama terlebih dulu. Tanpa itu, para pembelajar –jika selalu disuguhkan informasi dan pemahaman yang salah- bisa terapar oleh radikalisme dan ekstremisme. Survei PPIM (2018) menunjukkan bahwa 59,5% siswa dan mahasiswa memiliki akses terhadap internet dan 59,7% di antaranya memiliki faham yang cenderung radikal.

Critical thinking adalah sesuatu yang hilang pada mereka yang mencari informasi di *social media*. Kalau kita bedah satu per satu narasi-narasi keagamaan yang tadi sudah dijelaskan, narasi tersebut lebih bisa disebut sebagai propaganda dari hasil tinjauan akademik (kebenaran). Misalnya, narasi bahwa Islam saat ini tertindas, untuk sampai pada kesimpulan ini, dibutuhkan pembacaan yang mendalam baik menggunakan *case study* maupun komprasi, tidak cukup dengan membacara satu atau dua literatur, harus membandingkan berbagai literatur. Hal ini tidak dilakukan oleh penggiat *social media*, sehingga informasi yang didapatkan ditelan tanpa *critical thinking*.

Sebelum maraknya media sosial dijadikan rujukan keagamaan, pembelajaran agama biasanya dilakukan secara konvensional dengan berguru kepada tokoh-tokoh agama/ulama secara sistematis dan terukur.



Mereka yang dijadikan rujukan telah diakui kredibilitasnya, menulis banyak buku, belajar dari lembaga pendidikan yang kredibel. Silsilah keilmuannya bisa dilacak dan informasi yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain membaca karya-karya mereka, pembelajaran juga dilakukan secara interaktif dan dua arah di lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan informal seperti pesantren.

Mempelajari agama dengan cara "konvensional" seperti ini mampu memberikan kita kemewahan ilmu yang sangat beragama, kita akan terekspos dengan berdebatan teroritik antara berbagai jenis pemikiran/mazhab tanpa perlu memaksakan satu pandangan yang paling benar. Latihan pemikiran sepertinya sangat membantu terutama saat berhadapan dengan perbedaan pendapat tentang hukum sesuatu. Seseorang tidak akan terjebak dalam kesempitan berfikir, saat sudah terbiasa dengan dialektika dan perdebatan.

Otoritas keagamaan yang biasanya dipegang oleh tokoh atau institusi tersebut tergantikan dengan munculnya media sosial. Media sosial menyuguhkan informasi terkait isu dan hukum-hukum dalam agama yang ditulis oleh sumber-sumber yang sangat ringkas. Memang, informasi yang didapatkan bisa sangat majemuk, namun kelemahan dalam mempelajari agama menggunakan media sosial adalah kita tidak akan mampu mendapatkan informasi yang memadai tentang sesuatu menggunakan media sosial, karena media sosial kecenderungannya memberikan informasi yang cepat, sederhana dan pendek. Sehingga, kita agak gagal memahami betapa sesuatu itu cukup *complicated*, tidak sesederhana yang ditampilkan dalam sosial media.

Sering kita temukan muncul keresahan di dunia nyata akibat informasi/ilmu yang dibaca di sosial media. Contohnya, banyak media sosial yang menyajikan informasi bahwa transaksi A atau B adalah riba, sehingga transaksi tersebut haram dan harus dibatalkan. "Haram" ini menjadi viral sekaligus meresahkan

bagi sebagian kalangan. Padahal hukum transaksi tersebut masih menjadi diskusi dan perdebatan di kalangan ahli hukum Islam. Terdapat perbedaan pandangan dan masing-masing pandangan merujuk pada sumber yang otektik. Pada akhirnya, informasi prematur seperti ini dijadikan alat untuk mengukur hukum sesuatu buat dirinya dan buat orang lain yang pasti akan menimbulkan keresahan.

Beberapa kalangan menyebut fenomena ini dengan istilah *cyberreligion*. Secara sederhana *cyberreligion* adalah kehadiran institusi dan aktivitas keagamaan di dunia siber (Brasher, 2001). Internet dan *social media* menjadi otoritas keagamaan baru. *Cyberreligion* ini juga menandakan "kematian" otoritas keagamaan baik individu maupun insitusi dan digantikan oleh internet. Kelompok muda yang ingin mempelajari agama, terjebak dalam kemudahan mengakses informasi/ilmu yang ada di sosial media. Sosial media memberikan informasi yang lugas, singkat dan tidak *complicated* seperti yang disajikan oleh buku-buku dan tulisan akademik lainnya. *Cyberreligion* yang melembaga di dunia maya ini memang lebih praktis dan cepat meski tidak menjanjikan hasil yang maksimal terhadap pemahaman kontennya.

Strategi Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Pengarusutamaan moderasi beragama memang bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan ini harus menjadi tanggungjawab *political society* maupun *civil society* dan perlu dilakukan upaya-upaya kolaboratif lintas sektoral, tidak parsial. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai strategi untuk memperkuat dan mengarusutamakan moderasi beragama.

Meningkatkan Peran Lembaga Pendidikan

Pendidikan adalah media kunci untuk memperkuat kembali moderasi beragama. Pendidikan yang baik, akan melahirkan manusia yang toleran dan moderat. Seperti

yang sering disebut *the highest result of education is tolerance* (Keller, 1903). Handling problem yang muncul melalui sosial media bukanlah hal yang mudah. Penggunaan sosial media secara positif akan menghasilkan dampak yang juga positif, sehingga baik atau tidaknya efek sosial media sangat bergantung pada motivasi orang-orang yang ada di balik media sosial tersebut. Negara tidak bisa melakukan blokir begitu saja terhadap media sosial, karena media sosial juga menjadi wadah kegiatan ekonomi yang efektif, media sosial juga menjadi media komunikasi yang jauh lebih cepat dan mudah. Sehingga, yang perlu diarahkan adalah orang yang memproduksi narasi dan orang yang "menelan" narasi yang disuguhkan di *social media*.

Menyasar para produsen narasi ternyata tidak mudah juga. Selama produsen narasi-narasi tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi, mereka bisa melakukan kegiatan tersebut atas nama kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, objek yang perlu dijadikan pusat perhatian adalah para penerima informasi/narasi yang sebagian besar adalah kelompok usia muda.

Lembaga pendidikan memiliki keunggulan karena mampu menjangkau kelompok muda yang rawan terpapar narasi intoleran tersebut baik yang ada di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi. Itulah mengapa lembaga pendidikan diharapkan melakukan sesuatu. Tentu, upaya yang dilakukan oleh satu sektor pendidikan saja tidak cukup, harus ada kerja lintas sektoral secara masif. Pemerintah melalui Kominfo misalnya membuat regulasi dan *punishment* kepada media-media yang sudah melebihi batas kebebasan berekspresi, NGO keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga bisa ambil andil dengan cara beradaptasi dan masuk ke dalam dunia media sosial secara lebih serius dan membajiri media sosial dengan narasi, pesan dan informasi yang valid dan inklusif. Partai politik dan Dewan Perwakilan

Rakyat bersama pemerintah juga bisa menerbitkan regulasi atau undang-undang yang mengatur bagaimana ber-media sosial yang bertanggung jawab. Bahkan, *platform* sosial media itu sendiri juga bisa melakukan *screening* terhadap informasi-informasi yang membahayakan serta memberikan wadah bagi pembaca untuk melaporkan jika ada narasi-narasi yang dianggap berbahaya, *hoax* dan provokatif.

Lembaga pendidikan sebagai sebuah institusi memiliki peran besar dalam membentuk dan mengarahkan perilaku anggota-anggota yang ada di dalam institusi tersebut. Institusi bisa diibaratkan seperti mesin yang memproses sebuah *input* untuk keluar menjadi *output* yang diharapkan, baik atau tidaknya *output* tergantung pada proses di dalam institusi tersebut. Jika institusi bekerja dengan maksimal, maka *output* maksimal akan dilahirkan, begitu juga sebaliknya. Pendekatan institusionalis ini tidak hanya diyakini efektif untuk konteks pendidikan, namun juga untuk konteks politik, dan manajemen konflik.

Banyak penelitian menyarankan lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah dan perguruan tinggi mengambil posisi di garda depan untuk menghentikan arus tergingringnya anak muda ke arah pemikiran yang intoleran dan *close minded*. Seperti yang disinggung oleh Idris dan Putra (2021) bahwa institusi Pendidikan Islam harus terlibat dalam membangun semangat moderasi beragama kepada peserta didik. Hefni (2020) juga memiliki pemikiran yang sama bahwa lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik/mahasiswa oleh karena itu maka diperlukan upaya pengarusutamaan moderasi di lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Terkait dengan hal ini Abdullah dan Nento (2021) menyarankan bahwa dibutuhkan usaha untuk mengkonstruksi narasi (kata kunci) moderat di perguruan tinggi sehingga upaya untuk internalisasi nilai-nilai moderasi di kalangan mahasiswa/siswa lebih mudah dilakukan.



Masalah utama yang kita hadapi adalah rendahnya tingkat literasi media sosial di kalangan generasi muda. Inilah yang membuat mereka mudah memercayai informasi apa saja yang mereka dapatkan di media sosial, baik berupa hukum agama terkait hal tertentu maupun narasi agama yang berbalut politik.

Rendahnya literasi para pengguna media sosial juga menunjukkan minimnya kemampuan *critical thinking*, sehingga mereka dengan mudah bisa menyebarkan informasi-informasi yang belum bisa diverifikasi kebenarannya. Itulah hal utama yang harus di-*address* oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan diharapkan mampu membentuk anak muda yang terdidik dalam bermedia sosial dan kritis terhadap informasi yang beredar di dunia maya.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, lembaga pendidikan berfungsi untuk membentuk karakter anak didik. Dengan berkembangnya sosial media sebagai realitas baru dalam kehidupan manusia modern, maka pendidikan karakter yang dimaksud jangan hanya terfokus pada tata cara bersikap dan berperilaku di dunia nyata, namun juga harus dimaknai dengan bagaimana membentuk karakter anak didik di realitas maya (*social media*). Baik realitas nyata maupun realitas maya, dua-duanya membutuhkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab. Lembaga pendidikan memiliki kesempatan terdepan dalam membentuk sikap bertanggung jawab tersebut.

Instrumen pertama yang bisa digunakan oleh lembaga pendidikan dalam membentuk anak didik (siswa dan mahasiswa) yang bertanggung jawab, *literat* dan memiliki *critical thinking* adalah kurikulum. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, lembaga pendidikan perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan menjadikan perkembangan baru tersebut bagian dari kurikulum yang diajarkan. Lembaga pendidikan tidak bisa menghindar dan

menutup diri dari keharusan untuk beradaptasi dengan perkembangan lingkungan eksternal. Dengan meng-*embrace* perubahan tersebut, lembaga pendidikan berada satu frekuensi dengan dunia anak muda. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki gambaran yang jelas tentang dimana posisi mereka dan apa yang seharusnya mereka lakukan.

Di dalam kurikulum, lembaga pendidikan perlu mengembangkan materi-materi yang tidak hanya mengasah kemampuan memori siswa/mahasiswa namun juga kemampuan untuk menyaring informasi. Supaya bisa menyaring informasi, maka Siswa/mahasiswa harus dibiasakan dengan perbedaan pendapat, mengenal perdebatan filosofis yang kontradiktif di balik sebuah hukum atau argumen, bahwa tidak ada kebenaran yang *taken for granted*. Dengan demikian, materi yang diajarkan harus mencakup keberagaman dalam berfikir dan perbedaan pemikiran merupakan kondisi yang wajar. Di level yang lebih ekstrem, pemikiran yang skeptikal (selalu meragukan kebenaran sesuatu), pada tataran tertentu, menjadi dasar lahirnya *critical thinking* tersebut, mereka yang memiliki pemikiran skeptikal tidak mudah dihasut dan cenderung kritis terhadap informasi yang disuguhkan.

Dengan demikian, sekolah perlu mengembangkan kurikulum mampu menjadi dasar lahirnya pemikiran inklusif dan kritis. Dalam bahasa lain, Zuhri (2019) menyebutkan bahwa perlu ada konstruksi Islam *wasathiyah* dalam kurikulum Pendidikan Islam. Terkait dengan pembelajaran agama, misalnya, beberapa lembaga mulai membuka diskusi untuk mengajarkan agama dengan pendekatan *religious studies*. Siswa atau mahasiswa tidak hanya mempelajari agamanya saja, namun juga diberikan informasi yang memadai tentang agama lain, sehingga mereka memiliki pengetahuan dasar tentang agama lain. Kurikulum seperti ini untuk menumbuhkan semangat toleransi, sikap intoleran kadang muncul dari ketidak tahuan. Kurikulum seperti itu juga bagus untuk mencegah mereka untuk

tidak mudah terhasut oleh narasi-narasi propaganda lintas agama.

Hanya sekolah atau lembaga pendidikan yang mampu menanamkan watak kritis tersebut kepada anak muda. Karena hanya di sekolah atau perguruan tinggi pergulatan dan latihan itu bisa dilakukan. Lembaga pendidikan memiliki sumber daya tenaga pengajar yang bisa mengambil peran sebagai pembimbing dalam proses berfikir, berdebat, dan berdialektif tersebut. Dengan demikian sekolah atau perguruan tinggi telah menjalankan perannya sebagai "pabrik" tempat menampa pemikiran siswa menjadi pemikiran yang kritis, tidak mudah terhasut oleh narasi propaganda dan perbedaan pendapat.

Penguatan Peran *Civil Society*

Gambaran di atas tentu menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang saat ini menggalakkan prinsip moderasi dalam beragama. Melakukan *mainstreaming* moderasi sudah menjadi target yang harus dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Tentu, realitas sosial media saat ini akan menjadi tantangan berat dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Dalam menyusun strategi untuk merespon hal tersebut, harus disadari bahwa kehadiran *social media* adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindarkan. Media sosial di kalangan remaja Indonesia, juga menjadi bagian dari gaya hidup. Media sosial adalah wadah yang dengan mudah memengaruhi pikiran orang melalui narasi-narasi yang singkat, tegas dan sederhana. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah *nature* dari para pembaca sosial media yang kurang *critical* terhadap informasi yang diperoleh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, patut dilakukan beberapa hal berikut.

Jika dilakukan analisis SWOT, kita akan tahu bahwa kita memiliki persoalan baik di level *supply* informasi maupun di level *demand*/penerima informasi. Pada level *supply* informasi, kelemahan narasi moderat adalah karena kurang menarik secara konten, tidak

produktif (produksi kontennya jauh berada di bawah media non moderat), terkesan *complicated*, lebih banyak fokus ke konten untuk kalangan internal dan kaku. Dengan demikian, perlu ada evaluasi dan reformasi dalam upaya-upaya kontra narasi yang sudah dilakukan selama ini.

Tanggung jawab ini bisa dipikul bersama, termasuk oleh *civil society*. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk merangkul dan menyamakan persepsi dengan ormas-ormas yang ada merupakan langkah awal yang penting (Republika, 2019). Upaya untuk meningkatkan kembali moderasi beragama harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan. Ormas seperti NU dan Muhammadiyah memiliki modal besar yang bisa digunakan. Bahkan menurut Zakia Derajat (2017) bahwa NU dan Muhammadiyah adalah dua lembaga yang menjadi penjaga moderatisme beragama di Indonesia. Kedua lembaga (dan lembaga lainnya) memiliki jaringan sekolah dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mereka memiliki sumber daya dan fasilitas yang digunakan untuk mengembangkan moderatisme dalam beragama (Al-Mu'tashim 2019).

Selain itu, ormas-ormas besar di Indonesia juga media sosial masing-masing dan memiliki pembaca dalam jumlah yang banyak. Selama ini jumlah kunjungan ke media sosial ormas seperti NU dan Muhammadiyah memang jauh di bawah jumlah kunjungan ke media yang menyuguhkan informasi yang kurang moderat. Oleh karena itu, peran ormas seperti NU dan Muhammadiyah sangat diharapkan terutama dalam memproduksi narasi moderat dengan kemasan yang menarik bagi kaum milenial.

Tentu saja, aktifitas ini tidak hanya dititik beratkan pada konten (konten-konten yang bagus adalah yang singkat, sederhana namun kuat dan persuasif), tapi juga format, *layout*, desain dan penyajian harus *friendly* dan milenial (karena mayoritas pembaca adalah



anak muda) sehingga pembaca tidak bosan dan jenuh.

Literasi Ber-media

Pada level penerima informasi, perlu dilakukan literasi media. Menurut Taele dan Sulzby (1986) literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi "membaca, berbicara, menyimak dan menulis" dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian maka literasi media adalah seperangkat kecakapan yang berguna dalam proses mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam beragam bentuk. Literasi media digunakan sebagai model instruksional berbasis eksplorasi sehingga setiap individu dapat dengan lebih kritis menanggapi apa yang mereka lihat, dengar, dan baca.

Terkait dengan hal ini, beberapa peneliti juga mengusungkan perlu literasi media terutama bagi generasi muda. Kosasih (2019) mengatakan bahwa pembaca media sosial harus diberikan perangkat berfikir untuk membedakan mana yang bisa diterima dan mana yang harus ditolak.

Literasi media ini adalah langkah jangka pendek yang harus dilakukan. Bahkan bagi Wahyudi dan Kurniasih (2021) literasi media ini adalah jihad yang perlu dilakukan di era revolusi digital 4.0 ini. Sebetulnya negara bisa melakukan upaya literasi digital ini dengan menggunakan jaringan aparatur negara yang sampai ke level bawah. Jika dioptimalkan, kekuatan negara jauh lebih kuat dibanding platform-platform non moderat tersebut. Pemerintah adalah entitas yang besar, memiliki aparatus dan sumber daya yang banyak, sangat tidak masuk akal jika institusi besar ini kalah oleh segilitir kelompok.

Literasi media bisa dimulai dari aparatur negara yang akan menjadi ujung tombak dalam agenda *counter* narasi. Kementerian Agama memiliki jaringan aparatur sampai ke level kelurahan, dan banyak penyuluh agama

yang bisa dioptimalkan fungsinya. Mereka adalah aktor pertama yang perlu diberikan literasi agama. Karena tidak jarang ditemukan, para aparatur sendiri yang terpapar dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Posisi mereka sebagai aktor yang "menyuluhkan" agama, sangat penting. Oleh karena itu sebelum memerikan pemahaman kepada publik, mereka sudah harus terlebih dahulu diliterasikan.

Langkah jangka panjang adalah mengupayakan edukasi dan *critical thinking* pada para pembaca sosial media. Tidak mungkin kita menutup akses terhadap media sosial, itu sebuah keniscayaan di era sekarang, perlu ditanamkan *critical thinking* sehingga apapun prpoaganda yang muncul di soal media, bisa ditelaah dan disaring terlebih dahulu. *Critical thinking* secara sederhana bisa diartikan sebagai sikap untuk tidak menerima kebenaran informasi secara *take for granted*, seseorang yang kritis akan menelaah dan melakukan *cross check* terhadap informasi dan kebenaran yang dibaca terlebih dahulu.

Untuk melakukan agenda-agenda tersebut (baik di level *supply* maupun *demand*), kementerian agama perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Di level *supply*, kerjasama bisa dilakukan dengan media-media *mainstream* yang selama ini sudah ikut dalam kontestasi, jangan biarkan mereka bertarung sendiri. Pemerintah memiliki *privilege* untuk meminta aktor-aktor lain untuk terlibat misalnya meminta kontribusi para *influencer social media* yang menjadi *role model* para milenial untuk menyampaikan narasi-narasi yang diinginkan. Di level *demand*, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral, kementerian agama, kementerian pendidikan dan kebudayaan dan juga mungkin kementerian informasi.

Hefni (2020) menambahkan bahwa selain institusi di atas, perguruan tinggi kembali diharapkan mengambil peran penting. Dia mengatakan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai laboratorium

perdamaian kemudian menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial. Lembaga pendidikan perlu menumbuhkan budaya berfikir kritis kepada siswa dan mahasiswa, sehingga mereka mampu menyaring informasi dengan baik.

PENUTUP

Menggalakkan Moderasi beragama merupakan agenda yang menjadi prioritas negara. Adanya polarisasi dalam masyarakat, meningkatnya angka intoleransi di kalangan anak muda menjadi alasan yang cukup penting mengapa penguatan moderasi beragama harus dilakukan. Ditambah lagi, keroposnya moderasi beragama dipengaruhi oleh keberadaan *social media* yang digunakan sebagai wadah penyebaran narasi intoleran; media sosial sebagai realitas kedua manusia ternyata mampu memengaruhi dan membentuk persepsi dan pemahaman orang yang membacanya dengan mudah.

Melihat kondisi tersebut, maka lembaga pendidikan perlu berdiri paling depan untuk menetralsir dan mengembalikan moderasi dalam beragama dengan cara menyediakan seperangkat kurikulum, keahlian dan cara pandang yang bisa membentengi anak muda dari infiltrasi ide dan narasi yang tidak moderat. Selain itu, peran *civil society* juga sangat penting untuk memberikan kontra narasi sehingga narasi intoleran bisa diimbangi dengan narasi yang jauh lebih menyejukkan. Baik pemerintah maupun *civil society* bisa bekerjasama dalam memberikan literasi digital kepada masyarakat terutama anak muda. Upaya pengarus utamaan kembali moderasi beragama ini memang tidak bisa dilakukan oleh satu aktor saja, butuh kerja lintas sektor melibatkan baik pemerintah maupun *civil society*.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Report

- Abdullah, Abdul haris. Nento, Shinta. (2021). "Constructing Religious Moderation in Islamic Higher Education" dalam Al-Ulum Vol21 No1 June, 166-186
- Akhmadi, Agus. (2019). "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity" dalam Jurnal Diklat Keagamaan Vol 13, No.2, 45-55
- Almu'tasim, Amru. (2019). "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia." TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman 8, no. 2, 199-212.
- Ardhianto, Imam. (2016). "Kontra Publik Keagamaan dalam media baru: Islam, Kebudayaan Populer dan media sosial pada Gerakan #IndonesiatanpaJIL", Antropologi Indonesia, Vol 2. 83-102
- Aulia, N. N. (2017). "Islam dan Mediatisasi Agama." Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 1 | Januari -Juli 2017.
- Barbera et all, (2015). "Tweeting From Left to Right: Is Online Political Communication More Than an Echo Chamber?" Psychological Science, Vol. 26(10) 1531 -1542
- Bogdan, Robert C. And Taylors K.B, (1992). *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Ally and Bacon inc,)
- Brasher, Brenda. (2001). *Give Me that Online Religion*. San Fransisco: Jossey-Bass Inc
- Campbell, H. A. (2013). *Digital Religion: Understanding Religious Practice In New Media Worlds*. London And New York. Taylor And Francis Group
- Dawing, Darlis. (2017). "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural." Dalam Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat Vol 13, no. 2, 225-255
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. (2019). "Moderasi Beragama Di Indonesia." Dalam Intizar 25, no. 2
- Hamdi, Saibatul. Munawarah. Hamidah. (2021). "Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi" dalam Intizar Vol. 27 No. 1
- Hefni, Wildani. (2020). "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri" dalam Jurnal Bimas Islam Vol 13 no.1, 1-22.
- Hjarvard, S. (2008). *The mediatization of religion. A theory of the media as agents of religious change*. Northern Lights
- Idris, Muhammad. Putra, Alven. (2021). "The Roles of Islamic Educational Institutions in Religious Moderation" dalam Academic Journal of Islamic Studies, Vol 6, No. 1, 25-48
- Johansson, Anders C. (2016) "Media Social and Politics in Indonesia", Stockholm School of Economics Asia Working Paper No. 42

- Kosasih, Engkos. (2019). "Literasi Media Sosial dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama" dalam Jurnal Bimas Islam, Vol 12 No.2, 264-296
- Lim, Merlyn. (2013). "The Internet and Everyday Life in Indonesia: A New Moral Panic", Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde (Brill) 133-147
- Lim, Merlyna. (2017) "Freedom To Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, And The Rise Of Tribal Nationalism In Indonesia", Critical Journal of Asian Studies, Volume 49, -Issue 3.
- Mustakim, Zaenal. Ali, Fachry. Rahmat, Kamal. (2021). "Empowering Students As Agents Of Religious Moderation In Islamic Higher Education Institutions" dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol 7 No. 1, 65-76
- Neuman, W. Lawrence, and W. Lawrence Neuman, (2004), *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Pearson)
- Nisa, Eva F. (2018). "Social Media and the birth of Islamic Social Movement ODOJ in contemporary Indonesia", Indonesia and the malay world, vol 44, No. 134, 24-43
- PPIM, Convey Report. (2019). [Vol.2 Nomor 1 – Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia](#)
- PPIM, Convey report. (2018). [Vol.1 Nomor 1 – Api dalam Sekam: Sikap dan Keberagamaan Gen-Z](#)
- PPIM, Convey report. (2018). [Vol.1 Nomor 3 – Situs-Situs Islam: Kontestasi Narasi Radikal dan Moderat](#)
- Putra, A. R. (2018). "Efektivitas Instagram Pemuda Hijrah Terhadap Kesadaran Beragama Jamaah Masjid Al-Latiif Jl.Saninten Kota Bandung". Prosiding Komunikasi Penyiaran Islam, ISSN: 2460-6405 Volume 4, No. 1.
- Solahudin, Dindin and Moch Fakhruroji. (2020). "Internet And Islamic Learning Practices In Indonesia, Social Media, Religious Populism And Religious Authority", Religion, 11,19
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosadakarya)
- Teale, William H, Sulzby, Elizabeth. (1986). *Emergent Literacy: Writing and Reading: Ablex Publication Corp.* University of Minnesota.
- Wahyudi, Dedi. Kurniasih, Novita. (2021). "Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi "Jihad Milenial" ERA 4.0" dalam Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama Vol. 01, no. 1, 1-20
- Wahyuni, Dwi. (2019). "Agama Sebagai Media Dan Media Sebagai Agama", JIA, Nomor 2, 83-91
- Zuhri, Safudin. (2019). "Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) Dalam Kurikulum Pendidikan Islam" dalam Literasi Moderasi Beragama di Indonesia. Bengkulu: Zigie utama

Website

WeareSocial. <https://wearesocial.com/digital-2020>

CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106203229-20-446183/menag-hasil-survei-52-persen-pelajar-setuju-radikalisme>



Tirto. <https://tirto.id/survei-pesan-intoleransi-bertebaran-di-media-sosial-cfeY>

Republika. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/12/05/pj8toz320-peneliti-lipi-ungkap-korelasi-media-sosial-dan-intoleransi>

Cnn Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191113170928-20-448055/menag-sebut-banyak-rakyat-pelajari-tuhan-lewat-medsos>

Republika. Kemenag Samakan Persepsi Moderasi Beragama dengan Ormas.
<https://www.republika.co.id/berita/ql2hj9366/kemenag-samakan-persepsi-moderasi-beragama-dengan-ormas>

Media Indoensia. Ini pentingnya literasi digital bagi pelajar.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/444305/ini-pentingnya-literasi-digital-bagi-pelajar>